

KETUA BPK-RI MENYERAHKAN LHP LKPD DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Ketua BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2016 kepada Ketua DPRD dan Gubernur DIY. Acara tersebut dilaksanakan pada Rapat Paripurna Istimewa di Ruang Sidang DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta hari Kamis tanggal 8 Juni 2017.

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 Daerah Istimewa Yogyakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Rincian perkembangan opini BPK atas Laporan Keuangan tersebut selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Entitas	Opini LKPD				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Provinsi DIY	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Dalam sambutannya mengatakan "Sesuai undangan, dalam pertanggungjawaban salah satu hal penting kewajiban kepala menyampaikan daerah tentang pelaksanaan APBD Laporan Keuangan BPK. Pemeriksaan tugas konstitusional rangkaian akhir dari pasal 17 UU No. 15 mengamatkan



Ketua BPK-RI Peraturan Perundang-rangka pengelolaan dan keuangan negara/daerah, yang diatur adalah daerah menyusun dan rancangan peraturan pertanggung-jawaban kepada DPRD berupa yang telah diperiksa oleh atas LKPD merupakan BPK, dan sebagai proses pemeriksaan, Tahun 2004 kepada BPK untuk

menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi. BPK mempunyai keinginan yang kuat agar Pimpinan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel".

Turut hadir dalam acara tersebut Auditor Utama Keuangan Negara V Bambang Pamungkas, Kepala Perwakilan Yusradewi beserta para pejabat struktural dan tim pemeriksa LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta untuk Tahun Anggaran 2016, sedangkan dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dihadiri oleh Wakil Ketua dan Anggota DPRD, Plt. Sekretaris Daerah beserta jajarannya.

KUNJUNGAN KERJA ANGGOTA V KE BPK PERWAKILAN D.I YOGYAKARTA

Anggota V BPK RI Isma Yatun, pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2017 melakukan kunjungan kerja ke BPK Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta. Kunjungan kerja ini adalah kali pertama yang dilakukan pasca dilantik dan ditetapkan menjadi Anggota V pada tanggal 20 April 2017. Kedatangan Anggota V BPK-RI disambut oleh Kepala Perwakilan, Yusnadewi beserta para pejabat.

Pada kesempatan tersebut Anggota V BPK-RI memberi pengarahan kepada para pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, namun sebelumnya Kepala Perwakilan memberi gambaran sekilas tentang profil BPK Perwakilan D.I Yogyakarta.

Dalam pengarahannya Anggota V BPK RI mengatakan “ Pemeriksaan Tematik Kependudukan sudah tepat dilakukan oleh BPK karena kita sudah punya kajian dan renstra. Terkait dengan integritas, dalam waktu dekat yaitu tanggal 31 Mei 2017 adalah batas akhir kita menyerahkan LHP kepada entitas, hal itu merupakan tolak ukur ketepatan waktu kita dalam menjalankan tugas. Dibawah kepemimpinan ibu Yusnadewi supaya Perwakilan Yogyakarta bekerja lebih baik dan semaksimal mungkin, penuh integritas dan kehati-hatian karena banyak pihak yang mempertanyakan apa manfaat opini WTP itu, padahal itu merupakan tolak ukur keberhasilan suatu Laporan Keuangan”.



Selanjutnya Anggota V menyampaikan salam buat keluarga pegawai “Sampaikan salam buat istri-istri karena dibalik suami-suami yang sukses terdapat istri-istri yang selalu berdoa di rumah. Sampaikan juga salam buat bapak-bapak supaya ridho dan ikhlas selama ibu-ibu bekerja. Setiap pagi cium tangan suami sebelum bekerja supaya nyaman dalam bekerja dan selalu amanah”. Acara pengarahan Anggota V BPK-RI ditutup dengan ramah tamah dan foto bersama dengan seluruh pegawai.

PENYERAHAN LHP LKPD PADA KABUPATEN/KOTA SE-DIY

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 menyerahkan

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-DIY untuk Tahun Anggaran 2016 secara serentak. Kepala Perwakilan BPK Provinsi DIY Yusnadewi, menyerahkan LHP tersebut kepada masing-masing Ketua DPRD dan Kepala Daerah yang hadir di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.



Dari LHP yang diserahkan, seluruh Kabupten/Kota di wilayah Provinsi DIY meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Rincian perkembangan opini BPK atas Laporan Keuangan lima daerah tersebut selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

No	Entitas	Opini LKPD				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Kab. Bantul	WTP DPP	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP
2	Kab. Gunung Kidul	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
3	Kab. Kulon Progo	WDP	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP
4	Kab. Sleman	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kota Yogyakarta	WTP DPP	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP

Dalam sambutannya Yusnadewi mengatakan “Sebelum LHP atas laporan keuangan ini diserahkan, BPK telah meminta tanggapan

kepada masing-masing pemerintah daerah atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi atau *action plan* yang akan dilaksanakan oleh pihak pemerintah daerah tersebut sehingga rekomendasi BPK menjadi bermanfaat dan mudah untuk ditindaklanjuti. BPK menghimbau kepada para Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD beserta seluruh jajarannya agar segera melakukan langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut sesuai rekomendasi yang dimuat dalam LHP. Besarnya manfaat yang diperoleh dari pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Tindak lanjut wajib dilakukan maksimal 2 bulan setelah LHP diterima”. Selanjutnya



Bupati Gunung Kidul Badingah, dalam sambutannya yang mewakili Bupati/Wakikota se-DIY mengatakan “Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta telah berkenan melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Pemeriksaan Interim dan Pemeriksaan Substantif. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan tersebut. Namun demikian karena kelemahan dan kekurangan kami dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga masih terdapat temuan-temuan yang harus kami tindaklanjuti demi perbaikan ke depan. Selanjutnya dalam menindaklanjuti temuan-temuan tersebut kami telah menyusun Rencana Aksi (*Action Plan*) yang harus diselesaikan tepat waktu”

Hadir dalam penyerahan LHP LKPD tersebut seluruh Ketua DPRD, Bupati/Walikota se- DIY beserta seluruh jajarannya, sedangkan dari BPK Perwakilan Provinsi DIY dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan pemeriksa.

UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HARI KEBANGKITAN NASIONAL KE 109 TAHUN 2017



Kebangkitan nasional ditandai dengan momentum pergerakan nasional, yang merupakan momentum perubahan dari perjuangan yang tidak terorganisir menjadi terorganisir; dari perjuangan yang tidak terencana menjadi terencana, dari perjuangan yang sifatnya ke daerahan menjadi perjuangan yang sifatnya nasional, dari bangsa yang tidak berparlemen menjadi bangsa yang berparlemen. Gerakan inilah yang memiliki kehormatan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kemerdekaan dan kekuatannya sendiri. Akumulasi dari berbagai makna perubahan inilah dilakukan untuk mencapai Indonesia mulia. Terkait dengan semangat kebangkitan nasional tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 melaksanakan Upacara bendera untuk memperingati Kebangkitan Nasional Ke-109 tahun 2017.

Kepala Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yusradewi selaku Pembina Upacara membacakan pidato Menteri Komunikasi dan Informatika RI. "Semangat kebangkitan nasional tidak pernah memudar, namun justru semakin menunjukkan urgensinya bagi kehidupan berbangsa kita hari-hari ini. Padahal semangat itu sudah tercetus setidaknya 109 tahun yang lalu, ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo, namun sampai sekarang tetap sangat ampuh menyatukan dan menyemangati gerak kita sebagai bangsa" Menteri Komunikasi dan Informatika RI mengawali pidatonya.



"Pemerintah terus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala sektor. Di sektor kelistrikan, misalnya, pembangunan ketenagalistrikan telah dilakukan di 2.500 desa yang belum mendapat aliran listrik. Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dari 4.300 kilometer jalan raya Trans-Papua, 3.800 kilometer diantaranya telah dibuka" papar Menteri Komunikasi dan Informatika RI.

Upacara bendera memperingati Kebangkitan Nasional Ke-109 tahun 2017 diikuti oleh pejabat struktural dan para pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Balai Diklat Yogyakarta.

BIMBINGAN TEKNIS APLIKASI PERSURATAN DAN PORTAL PERWAKILAN



Bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta, selama tiga hari (3 s.d 6 April 2017) BPK Perwakilan Provinsi D.I.Yogyakarta mengadakan bimtek penggunaan aplikasi persuratan versi 3.0 dan Portal Perwakilan. Acara yang dibuka oleh Kepala Perwakilan, Yusnadewi dan diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai. Sedangkan narasumber berasal dari Biro Umum dan Biro TI Sri Handayani, Muhammad Anshari dan Soes Hari Putra

Dalam sambutannya Yusnadewi berharap "Aplikasi persuratan versi 3.0 ini dapat

Selain aplikasi persuratan, bimtek juga memberikan bahan ajar tentang penggunaan portal internal BPK. Portal perwakilan sendiri beralamat di <https://portal.bpk.go.id/sites/diy>. Hanya pegawai BPK yang bisa *log in* di portal ini. Masing-masing pegawai mempunyai akun sendiri. Akun pegawai ini kemudian masuk dalam akun subbagian yang berfungsi menyebar informasi internal pada subbagannya. Untuk lingkup yang lebih besar ada *shared mailbox* yang dapat dimanfaatkan untuk berbagi informasi antar subbagian dalam satu perwakilan.

segera digunakan di Perwakilan DIY, oleh karena itu seluruh supaya menguasai aplikasi tersebut sehingga tidak ada lagi kendala dalam alur persuratan"

"Semangat dari acara ini adalah mengurangi penggunaan kertas untuk pembuatan nota dinas maupun surat masuk dan surat keluar. Persuratan versi 1.0 sendiri telah ada sejak tahun 2012 oleh biro TI yang bekerja sama dengan biro umum. Kualitas persuratan *diupgrade* menjadi versi 2.0 dengan menambahkan administrasi surat masuk dan surat keluar dan dilengkapi dengan fitur manajemen disposisi. Kemudian aplikasi ditingkatkan lagi menjadi versi 3.0 yang secara umum menu utamanya terdiri dari menu pegawai, menu pejabat, menu

inputer UK (Unit kearsipan), menu inputer UKP (Unit Kerja Pengolah) dan menu setting. Masing-masing menu memiliki sub menu yang berbeda-beda" ucap Sri Handayani.



KISAH INSPIRATIF

JENDELA KERETA API

Hari itu, di kereta api terdapat seorang pemuda bersama ayahnya. Pemuda itu berusia 24 tahun, sudah cukup dewasa tentu. Di dalam kereta, pemuda itu memandang keluar jendela kereta, lalu berkata pada ayahnya.

Ayah lihat, pohon-pohon itu sedang berlarian"
Sepasang anak muda duduk berdekatan.
Keduanya melihat pemuda 24 tahun tadi dengan kasihan. Bagaimana tidak, untuk seukuran usianya, kelakuan pemuda itu tampak begitu kekanakan. Namun seolah tak peduli, si pemuda tadi tiba-tiba berkata lagi dengan antusiasnya, "Ayah lihatlah, awan itu sepertinya sedang mengikut kita!" Kedua pasangan muda itu tampak tak sabar, lalu berkata kepada sang Ayah dari pemuda itu. "Kenapa Anda tidak membawa putra Anda itu ke seorang dokter yang bagus? Sang Ayah hanya tersenyum, lalu berkata. "Sudah saya bawa, dan sebenarnya kami ini baru saja dari rumah sakit. Anak saya ini sebelumnya buta semenjak kecil, dan ia baru mendapatkan penglihatannya hari ini" Sahabat, setiap manusia di planet ini memiliki ceritanya masing-masing.

Jangan langsung kita men-judge seseorang sebelum kita mengenalnya benar.

Karena kebenaran boleh jadi mengejutkan kita.

Selalu berprasangka baik kepada setiap orang,

karena itu yang diajarkan nabimu, dan itulah cara yang baik untuk hidup...

<http://www.kisahinspirasi.com/2012/12/jendela-kereta-api.html>

REDAKSI ANGKRINGAN;

Yusnadewi (Pengarah), Ari Wibowo (Penanggung Jawab), Teguh Srihasto (Pemimpin Redaksi), Tri Budi Arief, Wahyu B.D., Ferianto

ALAMAT;

BPK Perwakilan Provinsi DIY
(Jl.HOS Cokroaminoto 52 Yogyakarta)

WEBSITE;

Yogyakarta.bpk.go.id

EMAIL;

humastu.yogyakarta@bpk.go.id

Feriz uan java Design

KILAS BERITA



No	Nama	Tanggal Lahir
1	Rahmadi Haryo Pamungkas, S.E	1 April 1976
2	Ponijan	6 April 1960
3	Nina Triningsih, S.Kom., M.Sc., M.Ec.Dev	19 April 1979
4	Bambang Purwedi Sugihartono, S.E	25 April 1966
5	Muhammad Hasbi Ash-Shiddiq S.E.,M.M	4 Mei 1983
6	Mira Tri Setiyaningrum, S.T	24 Mei 1981
7	Boris Ganda Sirait, S.Kom	27 Mei 1989
8	Agustinus Triyonojati, S.H.,M.H	28 Mei 1975
9	Hapsari Tribuwana Sri Bagio. S.E.,Ak	2 Juni 1979
10	Unik Khasanah	10 Juni 1991
11	Solikin	15 Juni 1960
12	Teguh Srihasto, S.E.,M.M	16 Juni 1971
13	I Gusti Agus Agung B, S.H	16 Juni 1982
14	Haryanto, S.E.	17 Juni 1979
15	Sugeng Sudiantoro, S.E.,M.M.,Ak	24 Juni 1980



Muhammad Hasbi Ash-Shiddiq S.E.,M.M

TMT 13/03/2017

Unit Kerja Lama: BPK Perwakilan Jateng

Jabatan Baru: Kepala Subbagian Keuangan BPK Pwk Prov. DIY



KISAH JENDELA KERETA API